

BAB III
UPAYA – UPAYA PENINGKATAN KERJA SAMA
ANTARA JEPANG – AMERIKA SERIKAT DALAM
MENGHADAPI PENINGKATAN KAPABILITAS
MILITER KOREA UTARA

Jepang menganggap Korea Utara sebagai ancaman bagi keamanannya. Meski Korea Utara sudah menghentikan uji peluru kendali dan nuklirnya, nyatanya mereka masih melakukan kegiatan militer di Semenanjung Korea, yang dianggap membahayakan Jepang. Bahkan Jepang beranggapan bahwa kegiatan militer yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan ancaman yang sangat serius serta sangat menekan Jepang. Semakin besar peningkatan militer suatu negara dapat menimbulkan kekhawatiran yaitu rasa tidak aman yang besar juga pada negara disekitarnya. Hal ini lah yang dirasakan Jepang atas peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Korea Utara, Jepang merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh Korea Utara.

A. Memperkuat Kerjasama Militer antara Jepang dan Amerika Serikat

Secara garis besar, untuk mewujudkan pertahanan yang kuat, dibutuhkan upaya diplomasi yang optimal. Dalam kajian pertahanan negara, dikenal sebutan Diplomasi Pertahanan yang tujuannya adalah melakukan upaya diplomatik baik ke dalam atau pun keluar, yang menggunakan perspektif pertahanan negara. Upaya diplomatik ini bisa saja kerja sama antar negara atau pun intra negara yang melibatkan peran militer atau pun non-militer.

Negara-negara bangsa akan membangun suatu keterhubungan pertahanan untuk berbagai alasan dan hubungan pertahanan antara negara-negara tetangga dirancang

untuk tiga hal penting yaitu: menambah pendalaman kekuatan pada pertahanan bangsa dan memperbaiki keamanan regional dan global.

Posisi Amerika Serikat dan Jepang dalam menghadapi masalah isu nuklir Korea Utara ini sangat jelas. Bila Korea Utara berhasil menjadi kekuatan nuklir baru, hal ini akan mengancam eksistensi Jepang dan bukan tidak mungkin Korea Utara akan melakukan penyerangan terhadap Jepang, dikarenakan Korea Utara mulai melakukan ancaman – ancaman dengan menguji coba rudalnya melalui batas wilayah Jepang. Sementara itu Amerika Serikat khawatir perkembangan program nuklir Korea Utara akan mengancam kepentingan Amerika Serikat di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur.

Konflik yang berkepanjangan di Semenanjung Korea sangat mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur, khususnya karena Korea Utara memiliki potensi untuk membangun dirinya menjadi kekuatan nuklir. Kepentingan Korea Utara dalam pengembangan nuklirnya adalah menjaga keamanan nasionalnya dari ancaman Amerika Serikat dan Jepang yang diberikan payung pertahanan oleh AS, sehingga produksi senjata dan pengembangan nuklir ditujukan untuk meningkatkan pertahanan keamanan nasionalnya dan kekuatan untuk bernegosiasi. Namun dengan adanya kekuatan senjata nuklir tersebut setidaknya telah memicu perlombaan senjata dan mempengaruhi terhadap situasi keamanan yang ada khususnya di Asia Timur.

Setiap negara memiliki pengaruh sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi kedudukan suatu negara dalam skala internasional, baik sebagai atribut yang melekat pada negara baik secara nyata ataupun tidak nyata. Korea Utara sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan Asia Timur nampaknya terus meningkatkan peranannya dalam kancah internasional melalui pengembangan nuklirnya. Dan hal yang

tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan *power* tidak selalu sama, dalam skala apapun adalah sesuatu hal yang wajar guna memperkuat kedudukan atau mempertinggi reputasi negara tersebut. Tindakan yang dillancarkan oleh Korea Utara dalam hal pertahanannya pada saat ini tidak terlepas dari upayanya dalam memenuhi segala kepentingan nasionalnya, termasuk juga dalam hal untuk menjadi suatu kekuatan hegemoni di kawasan Asia Timur, yang mana hal tersebut tidak terlepas dari upaya bangsa Korea Utara untuk mempengaruhi bangsa lain demi tercapainya kepentingan bangsa Korea Utara. (Wiriatmadja, 1970)

Ancaman Korea Utara sangat lah nyata dirasakan oleh Jepang, untuk itu Jepang memilih untuk semakin memperkuat aliansinya ataupun kerjasamanya dengan Amerika Serikat (dalam bidang militer) untuk melawan provokasi dari peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Korea Utara. Aliansi merupakan upaya negara bergabung dengan negara lain untuk menangkal ancaman bersama. Strategi yang aman yaitu bergabung dengan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap ancaman bersama. Dalam sebuah aliansi terdapat dua cara untuk melawan musuh yaitu melalui *balancing* dan *bandwagoning*. Dimana *Balancing* diartikan bahwa negara yang lemah melakukan aliansi dengan negara yang kuat dan berusaha untuk menyeimbangkan dengan negara yang kuat tersebut untuk melawan musuh. Sedangkan *Bandwagoning* yaitu negara yang lemah melakukan kerja sama dengan negara musuh, dengan kata lain negara lemah tersebut berteman dengan negara musuh, *bandwagoning* dianggap cara yang berbahaya karena bisa saja musuh akan merasa semakin berkuasa. (Walt, 2013)

Dalam hal ini Jepang memilih cara *balancing*, yaitu melakukan aliansi dengan Amerika Serikat. Alasan negara untuk melakukan *balancing* yaitu, jika suatu negara tidak melakukan *balancing*, maka negara tersebut akan mempunyai resiko untuk menerima dampak dari ancaman negara yang

dianggap mengancam. Sehingga disini akan dibahas mengenai Amerika Serikat dan Jepang melakukan aliansi karena menganggap ancaman militer Korea Utara sebagai ancaman bersama. Aliansi yang dilakukan Amerika Serikat dan Jepang untuk mengimbangi kekuatan terhadap ancaman militer dari Korea Utara.

Aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat merupakan aliansi yang telah berlangsung sejak tahun 1951 dan sampai saat ini masih berlangsung. Kedua negara belum menyatakan untuk mengakhiri aliansi. Dalam perjalanannya, aliansi mengalami beberapa pembaharuan - pembaharuan penting. Beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Jepang-Amerika Serikat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dan kerjasama baru. Security Treaty (U.S.-Japan Security Treaty) tahun 1951 direvisi dengan terbentuknya Japan-US Security Treaty 1960, Treaty Of Mutual Cooperation And Security Between Japan and The United States of America. Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1978 juga direvisi dengan terbentuknya Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat tahun 1997. Sampai saat ini, Japan-US Security Treaty 1960, Treaty Of Mutual Cooperation And Security Between Japan and The United States of America serta Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat masih menjadi landasan dan pedoman bagi Jepang-Amerika Serikat untuk menjalankan aliansi keamanan.

Dalam perkembangannya, aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat mulai memasuki tahapan aliansi yang lebih terkorodinasi dan melalui konsultasi yang lebih jauh. Pada awalnya aliansi fokus untuk pertahanan Jepang, kemudian berkembang dengan upaya untuk berpartisipasi dalam perdamaian dan keamanan internasional, respon terhadap dinamika keamanan di Asia Timur, komitmen untuk membangun perdamaian, serta peningkatan kerjasama di berbagai bidang untuk memperkuat aliansi.

Di dalam negeri Jepang, aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat sebenarnya menimbulkan pro dan kontra. Hubungan aliansi Jepang-Amerika Serikat yang telah terjalin lebih dari 60 tahun memunculkan beragam respon dalam masyarakat Jepang. Terdapat tiga kelompok dalam menyikapi masa depan kekuatan militer Jepang. Kelompok pertama adalah kelompok mainstream, yang menginginkan Jepang memperoleh tanggung jawab politik dan militer lebih besar dalam kerjasama pertahanan bilateral. Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) harus meningkatkan kemampuan. Jepang dan Amerika Serikat harus membangun forum dialog keamanan (security dialogue) serta meningkatkan saling-pemahaman (mutual understanding) dan efektivitas aliansi. Kelompok kedua adalah kelompok nasionalis yang berpandangan bahwa Jepang harus membangun kemampuan pertahanan sendiri dan melepaskan diri dari Amerika Serikat. Langkah awal yang diusulkan adalah merevisi konstitusi yang membatasi Jepang untuk mengembangkan kemampuan militer. Kelompok ketiga adalah Kelompok Pasifs yang menginginkan Jepang member kontribusi dalam kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengakhiri kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat. Kelompok Pasifs juga mendukung Jepang untuk mempertahankan konstitusi yang damai dan mengurangi kemampuan militer

Walaupun terdapat perdebatan di dalam negeri, Jepang masih berkomitmen untuk menjalankan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat, disisi lain komitmen Jepang akan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat, dikarenakan adanya ancaman Nuklir Korea Utara (dimana pada bulan Februari 2013, Korea Utara meluncurkan percobaan nuklirnya) Sehingga hal tersebut menjadi penguat Jepang untuk terus melanjutkan aliansinya dengan Amerika Serikat. Hal tersebut ditunjukkan dengan penegasan komitmen Jepang dan Amerika Serikat untuk terus memperpanjang aliansi keamanan pada tanggal 3 Oktober 2013. Perpanjangan aliansi tersebut merupakan bukti bahwa Jepang masih akan

bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan keamanan Jepang serta dunia internasional. (Listiana E. , 2018)

Pada tahun 2013, hubungan aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat memasuki babak baru. Pada tanggal 3 Oktober 2013, Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum terselenggaranya Security Consultative Committee (SCC) 2013 di Tokyo. Melalui kedua menteri tersebut, Jepang-Amerika Serikat melakukan konfirmasi mengenai pentingnya perpanjangan aliansi untuk memastikan keamanan Jepang dan stabilitas serta perdamaian di kawasan Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk terus memberikan bantuan keamanan kepada Jepang dalam menghadapi dinamika keamanan di kawasan Asia Timur. Selain itu, kedua negara sepakat untuk bekerja sama membangun aliansi yang seimbang dan efektif untuk bersama - sama bertanggung jawab membangun dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional. (DEFENSE, 2018)

Dengan mengambil kesempatan pada terselenggaranya SCC 2013 di Tokyo, kedua menteri juga sepakat untuk bekerjasama lebih jauh untuk memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat. Diskusi lebih lanjut mengenai perpanjangan serta penguatan dan perluasan aliansi yang baru antara Jepang-Amerika Serikat dilakukan dalam pertemuan SCC 2013. SCC 2013 yang diselenggarakan di Tokyo dihadiri oleh Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Chuck Hagel, serta Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida dan juga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry. Mengingat lingkungan keamanan yang semakin parah di wilayah Asia Timur, para menteri membahas aspek menengah hingga jangka panjang arah aliansi Jepang-Amerika Serikat dan penataan kembali tentara Amerika

Serikat di Jepang, dan wacana revisi Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat tahun 1997.

SCC 2013 membahas aspek penting aliansi yang baru pasca komitmen Jepang-Amerika Serikat untuk terus memperpanjang aliansi. SCC 2013 juga menghasilkan pernyataan bersama yang tercantum dalam Joint Statement of The Security Consultative Committee, Toward a More Robust and Greater Shared Responsibilities. Dalam Joint Statement tersebut, terdapat beberapa kesepakatan penting yang akan berpengaruh pada implementasi aliansi yang baru antara lain :

1. Penetapan visi strategis aliansi Jepang-Amerika Serikat yaitu komitmen untuk menjadi mitra penuh dalam aliansi yang lebih seimbang dan efektif. Kedua negara melakukan kerjasama dalam aliansi yang menggambarkan nilai-nilai bersama seperti demokrasi, mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Hal-hal tersebut didasarkan pada perluasan kerjasama keamanan dan pertahanan.
2. Jepang menyatakan komitmennya untuk membuat kontribusi yang lebih proaktif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Selanjutnya Jepang akan melakukan koordinasi yang lebih erat untuk memperluas perannya dalam kerangka aliansi Jepang-Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat menyambut baik upaya Jepang tersebut.
3. Menanggapi situasi keamanan di kawasan Asia Timur, Jepang-Amerika Serikat menyatakan bahwa aliansi harus tetap dalam posisi yang tepat untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan maupun tantangan terhadap norma-norma internasional. Diantaranya adalah program nuklir dan rudal Korea Utara serta terus mendorong Cina untuk memainkan peran yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam stabilitas regional, mematuhi norma internasional dalam

berperilaku, serta meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam melakukan modernisasi kemampuan militer. Perpanjangan aliansi Jepang-Amerika Serikat tahun 2013 berupaya untuk melaksanakan kerjasama keamanan dan pertahanan untuk meningkatkan dan memperkuat aliansi. (DEFENSE, 2018)

Perpanjangan aliansi Jepang-Amerika Serikat tahun 2013 berupaya untuk melaksanakan kerjasama keamanan dan pertahanan untuk meningkatkan dan memperkuat aliansi, antarlain:

- a. Kerjasama untuk meningkatkan pertahanan rudal balistik, Ballistic Missile Defense (BMD). Hal tersebut dilakukan dengan menunjuk pangkalan angkatan udara di Kyogamisaki sebagai tempat penyebaran radar TPY-2.
- b. Joint/Shared Use of Facilities Penggunaan bersama fasilitas dan wilayah bagi Jepang-Amerika Serikat dilaksanakan untuk memperkuat kemampuan aliansi serta meningkatkan postur JSDF di daerah termasuk di pulau-pulau barat daya Jepang.
- c. Kerjasama Peralatan dan Teknologi Pertahanan Kedua negara menyambut baik hubungan baru melalui kolaborasi dalam kerjasama peralatan dan teknologi pertahanan, seperti partisipasi industri Jepang dalam produksi pesawat F-35.
- d. Pelatihan Bersama Kedua Menteri menyambut pelatihan bilateral efektif, meningkatkan latihan di luar wilayah Okinawa, termasuk partisipasi MV22 Osprey di dalam menjalankan operasi di wilayah Jepang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas, kesiapan, mobilitas operasi JSDF dan Pasukan Amerika Serikat dan untuk meningkatkan deterrence aliansi Jepang-Amerika Serikat.
- e. Official Development Assistance Jepang memberikan bantuan Official Development Assistance dalam kerangka pembangunan regional, misalnya penyediaan kapal patroli

pesisir dan pelatihan keselamatan maritim bersama mitra regional, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional.

- f. Keamanan maritime Kerjasama lebih lanjut dalam keamanan maritim dan kontra pembajakan, memastikan keamanan Sea Lines of Communication/SLOC serta mempromosikan perdamaian. (DEFENSE, 2018)

Semakin kuatnya hubungan aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang dikarenakan keadaan security dilemma di kawasan yang dibuat oleh Korea Utara. Semakin besar peningkatan militer suatu negara dapat menimbulkan kekhawatiran yaitu rasa tidak aman yang besar juga pada negara disekitarnya. Ketika sebuah negara merasa terancam, maka negara tersebut memiliki dua pilihan yaitu bertindak menyerang secara langsung atau bertahan (defense) dengan memperkuat militernya. Pada skripsi ini Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap Jepang pada hubungan aliansi militer Amerika Serikat dengan Jepang untuk melawan peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Korea Utara. Kekuatan aliansi yang dilakukan juga digunakan sebagai alat untuk menghalangi kekuatan dari Korea Utara.

B. Strategi Trilateral (Amerika Serikat – Jepang – Korea Selatan)

Semakin besar peningkatan militer suatu negara dapat menimbulkan kekhawatiran yaitu rasa tidak aman yang besar juga pada negara disekitarnya. Ketika sebuah negara merasa terancam, maka negara tersebut memiliki dua pilihan yaitu bertindak menyerang secara langsung atau bertahan (defense) dengan memperkuat militernya. Seperti halnya Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap Jepang melalui hubungan militer Amerika Serikat dengan Jepang untuk melawan peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Korea Utara. Namun tidak cukup dengan bantuan dari Amerika Serikat saja, Jepang perlahan-lahan juga mulai membuka diri

terhadap Korea Selatan, dimana Jepang juga mengajak Korea Selatan untuk ikut dalam menghadapi agresivitas militer Korea Utara. Jepang dan Korea selatan mulai untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara tersebut, sebelum pada akhirnya membentuk trilateral (Amerika Serikat, Jepang, Korea Selata) untuk melawan agresivitas dari Korea Utara. Pada dasarnya jika hanya sebuah hubungan bilateral saja tidak akan cukup untuk menangkal ancaman dari Korea Utara, dimana ancaman yang semakin lama menjadi sangat kompleks dan pada kenyataanya China ternyata ikut terlibat dalam pendanaan nuklir Korea Utara. Sehingga strategi trilateral menjadi sebuah mekanisme yang efektif untuk menyatukan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara. (Iriawan, 2017)

1. Faktor Korea Selatan Sebagai Partner Strategis bagi Jepang dan Amerika Serikat

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, maka berdirilah dua negara berdaulat. Pada dasarnya, setelah terbelahnya Korea, baik Korea Selatan maupun Korea Utara diliputi ketegangan, baik ketegangan di bidang militer, maupun ketegangan yang ditimbulkan oleh konfrontasi yang dilakukan oleh kedua negara untuk menyatukan kembali kedua Korea. Konfrontasi militer pasca kemerdekaan yang dilakukan pada akhirnya menimbulkan perpecahan, dimana puncaknya adalah Perang Korea yang terjadi pada tanggal 25 Juni 1950. Awal dari perpecahan ini adalah ketika pasukan militer Korea Utara secara tiba-tiba menyerang dan melintasi perbatasan garis 38 derajat Lintang Utara, yang merupakan garis batas antara wilayah Korea Utara dengan Korea Selatan yang telah disepakati oleh kedua negara sebelumnya. Penyerangan ini didukung oleh rezim Kim Il Sung, pemimpin Korea Utara pada waktu itu, yang juga mendapat dukungan dari Uni Soviet dan China.

Penyerangan ini merupakan awal mula dari Perang Korea, dimana perang ini berlangsung dari 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini disebut sebagai proxy war (perang yang dimandatkan) antara Amerika Serikat beserta sekutunya dari Blok Barat dengan Republik Rakyat China (RRC) dan Uni Soviet dari Blok Timur. Pasca penyerangan, Dewan Keamanan PBB merespon tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut. Dengan suara bulat, DK-PBB mengancam invasi Korea Utara terhadap Korea Selatan tersebut melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. Menanggapi respon dari PBB tersebut, pihak Korea Utara kemudian mengajukan perundingan gencatan senjata pada 10 Juli 1951 di Kaesong, wilayah Korea Utara bagian selatan, namun berakhir dengan kegagalan. Gagalnya negosiasi tersebut melahirkan negosiasi gencatan senjata yang kedua, dimana berlangsung dua tahun kemudian dan bertempat di Panmunjon (perbatasan kedua Korea). Proses negosiasi berjalan sulit. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan sulit tercapainya proses gencatan senjata ini, salah satunya kepentingan dan perbedaan ideologi antara negara-negara tersebut.

Namun akhirnya, pada 27 Juli 1953, Amerika Serikat, China, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Dari pihak Korea Selatan, Syngman Rhee menolak menandatangani perjanjian tersebut, namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Walaupun begitu, secara resmi, perang antara kedua Korea ini belum berakhir. Bagi pihak Korea Selatan, dalam menghadapi konflik dengan Korea Utara, salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Korea Selatan adalah dengan cara memperkuat pertahanan di bidang militer. Hal ini dikarenakan Korea Utara adalah salah satu negara yang sudah memiliki kekuatan militer yang kuat, karena Korea Utara mendapat dukungan dari negara sekutunya di Blok Timur. Untuk memperkuat negaranya, Korea Selatan mulai mencari sekutu terdekat di wilayahnya. Jepang merupakan negara terdekat dalam regional Asia Timur. Walaupun Jepang pernah menjajah dan

meninggalkan luka akibat kolonialisme di wilayahnya, Korea Selatan menganggap langkah ini sebagai langkah baik, karena setelah Jepang hancur pada perang dunia ke dua, Amerika sebagai negara kuat juga ikut menjalin hubungan yang erat dengan Jepang.

Pandangan Korea Selatan agar menjalin hubungan dengan Jepang sangatlah tepat. Dari sisi Jepang, Perang Dunia II yang berlangsung selama tahun 1936-1945 merupakan perang terbesar sejarah kehidupan manusia, yang juga mengakibatkan kehancuran sangat besar dan menelan korban sampai jutaan jiwa. Selain itu, pasca Perang Dunia II, kondisi di Jepang pada saat itu memasuki periode yang disebut periode setelah perang, Politik luar negeri Jepang terhadap Asia pada waktu itu, lebih banyak ditentukan oleh kepentingan ekonomi negaranya. Kondisi ekonomi di Jepang yang kacau setelah perang dunia II berakhir dapat dengan cepat bertumbuh, dengan bantuan Amerika yang meningkatkan ekonominya menjadi negara industri dan sangat maju dibandingkan negaranegara lain di Asia Timur. Selama itu juga, setelah empat puluh tahun sejak bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki politik luar negeri Jepang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dasar Perdana Menteri Shigeru Yoshida.

Shigeru Yoshida melihat kondisi Jepang sangatlahterpuruk pada masa itu, baik secara politik maupun secara ekonomi. Secara politik dapat dilihat dari daerah-daerah jajahan Jepang yang lepas, secara ekonomi, terlihat dalam hyperinflasi yang terjadi dari pertengahan tahun 1945 sampai awal tahun 1949. Untuk mengatasi hal ini, Yoshida memiliki beberapa pemikiran yang ia implementasikan dalam membangun Jepang. Yoshida Doctrine ini lebih bersifat inward looking, yaitu bagaimana Jepang harus bangkit dari keterpurukan dengan cara membangun kekuatan dalam negeri terlebih dahulu, dengan lebih memfokuskan pembangunan negerinya kepada pembangunan perekonomian dalam negeri Jepang. Dalam doktrin ini, terdapat dua garis besar tujuan

yang ingin dicapai, yaitu rekonstruksi dan perkembangan di bidang ekonomi serta pertahanan, yang dilakukan dalam taraf atau biaya yang minimum. Implementasi doktrin Yoshida dalam menata kembali perekonomian Jepang tercermin dalam pembangunan Jepang secara besar-besaran dibidang industri. Ranah ekspor industri yang menjadi seperti tujuan utama Jepang pada waktu itu adalah helektronika, mobil, semikonduktor, dan bahan-bahan berteknologi tinggi.

Untuk menopang pembangunan Industri, Jepang memerlukan banyak sumber daya alam seperti gas alam, minyak bumi, dan bahan-bahan mentah lainnya. Untuk mencapai hal itu, Jepang mulai memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di Asia, terutama Korea Selatan. Tindakannya yang berupa reparasi perang ke negara-negara Asia Tenggara dan khususnya Korea Selatan pada tahun 1950-an dan 1960-an memudahkan jalan bagi perdagangan dan investasi, instrumen yang membantu memulihkan hubungan politik Jepang dengan negara tetangganya, serta negara-negara bekas jajahannya, termasuk Korea Selatan. Yoshida Doctrine membantu Jepang dalam merekonstruksi dan membangun perekonomian dalam negeri, meskipun tanpa menggunakan kekuatan militer. Dengan keadaan yang sama bagi kedua negara, dimana kedua negara tengah berusaha untuk membangun kembali negaranya dalam berbagai bidang, tentu memudahkan mereka dalam menjalin hubungan bilateral.

Perlu digaris bawahi bahwa untuk membangun kembali hubungan bilateral kedua negara tersebut pasca perang, kerjasama ekonomi lah yang sangat berpengaruh terhadap terbangunnya kembali hubungan bilateral mereka. Hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang semakin membaik pada awal perkembangannya. Pemimpin dan petinggi pemerintahan dari kedua negara menyambut dengan baik niat kedua negara untuk bersama-sama melangkah menuju masa

depan tanpa melihat dan terikat mengenai fakta sejarah kelam kedua negara di masa lalu. (Wijaya, 2018)

Semenanjung Korea dianggap sebagai suatu kawasan strategis dalam hubungan internasional di Asia Timur di mana Semenanjung Korea memiliki arti yang cukup penting dalam kepentingan nasional bagikeempat negara besar seperti Tiongkok, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat serta untuk membentuk dan mempertahankan *balance of power* di wilayah Asia Timur. Stabilitas keamanan di Semenanjung Korea saat ini tidak kondusif semua itu tidak terlepas dari ancaman yang diberikan oleh Korea Utara meskipun antara Korea Selatan dan Korea Utara sudah terjadi kesepakatan perjanjian gencatan senjata atau *armistice aggrement*, namun secara teknis kedua negara tersebut masih dalam status berperang. Melihat akan hal itu Korea Selatan perlu untuk memiliki pihak yang dapat melindungi negaranya bila sewaktu-waktu perang dengan Korea Utara akan pecah kembali.

Antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat melakukan aliansi yaitu aliansi pertahanan bersama yang mengatur jika salah satu negara diserang oleh pihak ketiga makapihak lain akan bertindak, dan juga kesepakatan meliputi bantuan militer untuk kebijakan salah satu negara sebagai contoh Korea Selatan turut membantu Amerika Serikat dalam kampanye perangnya di Vietnam dan Irak. Sejak saat itu Amerika Serikat adalah negara pelindung utama bagi Korea Selatan dan juga Korea Selatan sebagai basis kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

Aliansi pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan dibentuk sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan keamanan di Semenanjung Korea. Kerentanan Korea Selatan terhadap serangan dari Korea Utara, dan kepentingan strategisnya sebagai benteng melawan penyebaran agresi komunis pada awal perang dingin, merajut kebutuhan keamanan Amerika dan Korea Selatan bersama-sama. Aliansi tersebut memberikan jaminan keamanan kepada Korea Selatan

yang lemah sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat untuk pembelaannya.

Secara historis, setiap kali terjadiperubahan politik besar di wilayah Asia Timur, Semenanjung Korea selalu menjad ititik kritis. Kebenaran historis ini tidak berubah di era pra-modern atau bahkan setelah perkembangan hubungan internasional di Asia Timur di era modern. Sejarah tidak mungkin terulang lagi, karena realitas hubungan internasional post-modern abad kedua puluh satu sangat berbeda dengan hubungan internasional masa lalu untuk negara-negara Asia Timur manapun yang menggunakan konflik militer. 2Namun, kawasan ini masih berada di bawah lingkungan diplomatik yang bermusuhan karena sengketa historis dan teritorial serta perlombaan senjata intensif. (Marpaung, 2016)

Karena adanya kepentingan antara Korea Selatan terhadap Jepang maupun Jepang terhadap Korea Selatan, serta adanya aliansi yang sudah terjalin antara Korea Selatan terhadap Amerika Serikat, maka sepakatlah untuk Jepang dan Amerika Serikat memilih Jepang sebagai partner mereka. Disisi lain Jepang dan Amerika Serikat tidak memilih China sebagai partner mereka dikarenakan China adalah sekutu bagi Korea Utara, bahkan China dianggap ikut membiayai nuklir Korea Utara. Bahkan China juga ikut menuntut akan pengurangan sanksi terhadap nuklir Korea Utara. meminta agar sanksi internasional terhadap Korea Utara dikurangi sebagai insentif bagi negara itu untuk melakukan denuklirisasi. Seruan ini berpotensi membahayakan konsensus internasional untuk menekan Pyongyang. (voaindonesia, 2018)

2. Terbentuknya Strategi Trilateral (Amerika Serikat – Jepang – Korea Utara)

Jepang – Amerika Serikat – Korea Selatan memiliki hubungan yang tidak baik dengan Korea Utara. Adanya sejarah yang kelam dengan Korea Utara membuat ketiga

negara tersebut enggan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Korea Utara. Karena adanya kesamaan dalam hal memerangi Korea Utara, maka Amerika Serikat – Jepang – Korea Selatan sepakat untuk membentuk Kerjasama Trilateral dalam hal menekan Korea Utara dalam hal peningkatan kapabilitas militernya serta uji coba nuklirnya yang hingga saat ini masih terus dilakukan.

Pada dasarnya kerjasama pertahanan merupakan bagian dari diplomasi pertahanan. Prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama pertahanan harus diperhitungkan oleh pejabat-pejabat yang terlibat di dalam komitmen kerjasama pertahanan kedua negara atau lebih. Di dalam rumus-rumus hukum diplomatik juga harus mencermati jika ada kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya, seperti tekanan ekonomi dan tekanan politik. Kerjasama pertahanan tidak mengubah kebijakan politik dengan negara lain, dan kerjasama ini dapat menopang upaya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sains dan teknologi, khususnya di bidang industri pertahanan. (Multazam, 2010)

Maka adanya konsep pertahanan mampu menjadi landasan bagi Jepang dan juga Amerika Serikat bahkan Korea Selatan yang ikut terlibat dalam kerja sama untuk melawan agresivitas militer Korea Utara, serta menangkal ancaman – ancaman yang dilakukan oleh Korea Utara. Semakin besar peningkatan militer suatu negara dapat menimbulkan kekhawatiran yaitu rasa tidak aman yang besar juga pada negara disekitarnya. Ketika sebuah negara merasa terancam, maka negara tersebut memiliki dua pilihan yaitu bertindak menyerang secara langsung atau bertahan (defense) dengan memperkuat militernya. Seperti halnya Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap Jepang melalui hubungan militer Amerika Serikat dengan Jepang untuk melawan peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Korea Utara. Namun tidak cukup dengan bantuan dari Amerika Serikat saja, Jepang perlahan-lahan juga mulai membuka diri

terhadap Korea Selatan, dimana Jepang juga mengajak Korea Selatan untuk ikut dalam menghadapi agresivitas militer Korea Utara.

Jepang dan Korea selatan mulai untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara tersebut, sebelum pada akhirnya membentuk trilateral (Amerika Serikat, Jepang, Korea Selata) untuk melawan agresivitas dari Korea Utara. Pada dasarnya jika hanya sebuah hubungan bilateral saja tidak akan cukup untuk menangkal ancaman dari Korea Utara, dimana ancaman yang semakin lama menjadi sangat kompleks dan pada kenyataanya China ternyata ikut terlibat dalam pendanaan nuklir Korea Utara. Sehingga strategi trilateral menjadi sebuah mekanisme yang efektif untuk menyatukan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara. (Iriawan, 2017)

Korea Selatan (Korsel), Amerika Serikat (AS), dan Jepang setuju untuk membangun kerjasama trilateral guna mengatasi provokasi Korea Utara (Korut). Sebagaimana diketahui pada Korea Utara secara tiba – tiba melakukan peluncuran rudal balistik. Provokasi tersebut merupakan provokasi pertama sejak Presiden Korsel yang baru, Moon Jae-in menjabat.

Meskipun Korea Utara beralih melakukan peluncuran rudal tersebut dengan mempertimbangkan keamanan negeri tetangga, namun ketiga negara sekutu tetap mengecam aksi ini. Melalui keterangan resmi Kementerian Pertahanan Korsel, aksi Korut ini telah melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, ketiga negara bersahabat tersebut juga mempertegas pandangan mereka bahwa peluncuran rudal Korut merupaka 'ancaman yang tidak bisa diterima'. Tindakan tersebut juga dianggap telah mengguncang stabilitas dan kedamaian di wilayah Semenanjung Korea. Berdasarkan hal

inilah yang melatarbelakangi Korsel, AS, dan Jepang sepakat untuk memperkuat kemitraan secara lebih lanjut.

Wacana memperkuat kerjasama trilateral tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan dari perwakilan masing-masing negara. Korsel diketahui diwakili oleh Brigadir Jenderal Park Chul-kyun yang juga bertugas sebagai Wakil Direktur Jenderal untuk Kebijakan Internasional. Sementara dari AS diwakili oleh Asisten Deputi Menteri Pertahanan untuk Asia Timur, Christopher Johnston, dan perwakilan Jepang yaitu Direktur Kebijakan Pertahanan, Koji Kano.

Peningkatan kerjasama ini juga dibangun karena ada kekhawatiran di masa depan tentang kemungkinan adanya uji coba rudal balistik antarbenua dalam waktu dekat. Sebelumnya Dewan Keamanan PBB sendiri telah mengeluarkan pernyataan resmi yang isinya mengancam tindakan Korea Utara tersebut. (Vinanda, 2017)

Pada tanggal 11 Desember 2017 militer Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan melakukan atau menggelar latihan bersama, latihan tersebut dilakukan setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya dengan tujuan melacak rudal Korea Utara. Latihan bersama tersebut dilakukan kurang lebih selama dua hari, dan dilakukan di Perairan dekat Semenanjung Korea dan Jepang. Dimana pada latihan tersebut melibatkan 12.000 tentara militer Amerika Serikat yang bermarkas di Angkatan Udara Korea Selatan. (Yasinta, Kompas.com, 2017)

Dari penjelasan diatas penulis menjelaskan tentang bagaimana upaya Jepang dan Amerika Serikat dalam menghadapi pembangunan kapabilitas militer Korea Utara. Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh hasil bahwa upaya Jepang dan Amerika Serikat dalam menghadapi pembangunan kapabilitas militer Korea Utara dengan cara memperkuat aliansi kerjasama militer antara Jepang dan Amerika Serikat yang dibuktikan dengan adanya perpanjangan

kerjasama militer antara Jepang dan Amerika Serikat yaitu *Security Consultative Committee (SCC)* yang diselenggarakan pada tahun 2013, serta membentuk kerjasama trilateral antara Jepang – Amerika Serikat – Korea Selatan dimana pada kerjasama ini terbentuk sebuah latihan bersama antara Jepang – Amerika Serikat - Korea Selatan yang diadakan pada tanggal 17 Desember 2017.